

INTEGRASI USAHATANI DAN DIVERSIFIKASI KOMODITAS DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK KETERPURUKAN EKONOMI PASCA SERANGAN HAMA KELAPA *Aspidiotus destructor* DI KECAMATAN KEI BESAR KABUPATEN MALUKU TENGGARA

FARMING INTEGRATION AND COMMODITY DIVERSIFICATION FOR THE AGENDA OF OVERCOMES OF ECONOMIC DEPRESSING IMPACT POST COCONUT PEST RAID *Aspidiotus destructor* IN DISTRICT KEI BESAR, SUB-PROVINCE MALUKU TENGGARA

Ismatul Hidayah
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku

ABSTRACT

Coconut crop is main cost of economics of public in district of Kei Besar Maluku Tenggara. But in the year 2002, pest raid *Aspidiotus destructor* at coconut crop causes ugly chartered investment counsel impact to public. Handling of chartered investment counsel social impact as result of depressed [by] it effort for plantation of coconut faces various constraints, between of knowledge and skilled of limited public and government programs that is unsatisfying comprehends sometimes not effective. This article aim to determine alternative of effort for agriculture in integrating farming and diversification [by] commodity for the planning of overcomes of economic depressing impact post coconut pest raid . Based on opportunity, local constraint and agroecosystem character, there is 12 alternative of effort for agriculture suggested, that is (1) Rejuvenation of Coconut In, (2) Farm of cashew, (3) Mix crop farming, (4) Pulses and feed forage, (5) Orange and Pineapple farm (6) Duck and native chicken farm (7) local cow farm (8) goad and sheep farm (9) Fishery of Demersal Rock, (10) Fishery of Lobster and crap, (11) Fishery of Small Pelagis, and (12) Fishery of Green Cockle.

Key word : Farming integration, commodity diversification, *Aspidiotus destructor*

ABSTRAK

Tanaman kelapa merupakan pendukung utama perekonomian masyarakat di kecamatan Kei Besar Maluku Tenggara. Namun pada tahun 2002, serangan hama *Aspidiotus destructor* pada tanaman kelapa menyebabkan dampak ekonomi yang buruk terhadap masyarakat. Penanganan dampak sosial ekonomi akibat terpuruknya usaha perkebunan kelapa menghadapi berbagai kendala, diantaranya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat yang terbatas serta program program pemerintah yang kurang memahami yang terkadang tidak efektif. Tulisan ini bertujuan untuk menentukan alternatif usaha pertanian dalam integrasi usaha tani dan diversifikasi komoditas dalam rangka penanggulangan dampak keterpurukan ekonomi pasca serangan hama kelapa . Berdasarkan peluang, kendala dan sifat agroekosistem setempat, ada 12 alternatif usaha pertanian yang dianjurkan, yaitu (1) Peremajaan Kelapa Dalam, (2) Usahatani jambu Mente, (3) Usaha Tanaman Campuran, (4) Palawija dan Hijauan Pakan, (5) Usahatani Jeruk dan Nenas, (6) Usahatani Itik dan Ayam Buras, (7) Usahatani sapi Lokal, (8) Usahatani Kambing dan Domba, (9) Perikanan Karang Demersal, (10) Perikanan Lobster dan kepiting/Rajungan, (11) Perikanan Pelagis Kecil, dan (12) Perikanan Kerang Hijau.

Kata kunci : integrasi usahatani, diversifikasi komoditas, *Aspidiotus destructor*

PENDAHULUAN

Serangan hama *Aspidiotus destructor* pada tanaman kelapa tahun 2002 di Kecamatan Kei Besar Maluku Tenggara menyebabkan dampak yang luas dan berlanjut. Serangan ini berawal dari desa Wour kecamatan Kei Besar dan kemudian menyebar ke 42 desa lainnya di

kecamatan yang sama. Sejak serangan hama ini, produksi kopra terhenti dan berdampak pada penurunan secara drastis pendapatan petani kelapa. Sedangkan usaha kopra ini merupakan mata pencaharian utama dari sebagian besar penduduk di desa-desa tersebut. Sampai dengan tahun 2005, luas area tanaman kelapa yang

mengalami kerusakan adalah 25 % dan penurunan produktivitas perkebunan kelapa 58 % dari jumlah total luas area tanaman kelapa yang tercatat untuk kecamatan Kei Besar, Kei Besar Utara Timur dan Kei Besar Selatan. (Malra Dalam Angka 2006). Untuk dua kecamatan yang disebut terakhir belum ada laporan tentang serangan hama yang sama. Dengan demikian semua dampak buruk di atas (menjadi 100 %) menimpa kecamatan Kei Besar.

Penanganan teknis dampak serangan hama penyakit sudah dilakukan dengan menggunakan cara infus insektisida sistemik (dimecron) oleh petugas perkebunan, meskipun hasilnya belum menunjukkan pemulihan.

Dalam kaitannya dengan manajemen Pengendalian Hama Terpadu (PHT), secara esensial proyek-proyek yang pernah digulirkan pemerintah daerah pada kecamatan Kei besar belum menyentuh usaha pemberdayaan masyarakat. Kalaupun ada unsur pemberdayaan masyarakat dalam setiap program apa saja, ini tidak lebih dari sekadar "*lipstic*". Pada dasarnya dalam implementasi PHT, penerapan manajemen yang sistematis merupakan faktor yang utama, khususnya menyangkut komponen perencanaan, pemantauan dan pencatatan, dan penggunaan ambang ekonomi. Sistem yang demikian menghendaki adanya kemadirian petani yang merupakan kunci utama keberhasilan pengendalian dan penanganan dampak serangan hama penyakit (Untung 2003).

Tidak adanya penyelenggaraan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) untuk masyarakat perkebunan setempat, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang kepala dusun, menjadikan persyaratan tersebut tidak terpenuhi. Sebagai akibatnya adalah bahwa dalam

menghadapi kasus serangan hebat seperti tersebut di atas, pengendalian menjadi tidak efektif karena sebagian besar petani lebih bersifat pasif/reaktif daripada proaktif/preventif. Masyarakat menjadi gamang dan frustrasi setelah menghadapi sekaligus serangan hama, ketidakpastian harga komoditas dan keterbatasan modal.

Lemahnya kinerja semacam ini disebabkan oleh termarjinalkannya masyarakat desa secara politis. Masyarakat bukan saja tidak mengetahui jalan menuju akses pembentukan keputusan yang tepat sebagai solusi teknis PHT tepat guna dan menyeluruh, tetapi juga tidak memiliki jalan keluar bagi usaha-usaha alternatif untuk kebutuhan jangka pendek mereka. Sedangkan selama ini penentuan kebijakan terjadi ditingkat birokrasi paling atas.

Tanaman kelapa merupakan pendukung utama perekonomian masyarakat Kei Besar. Secara tradisional masyarakat tidak mungkin melepaskan diri dari usaha kelapa sementara mereka kurang siap berusaha di sektor lain dengan komoditas lain. Oleh karena itu sektor perkebunan menjadi lebih utama dari segi sosial ekonomi dan apapun alasannya pemusnahan pohon kelapa (*land clearing*) untuk tujuan membatasi serangan hama tersebut atau untuk tujuan lain seperti pergantian komoditas perkebunan adalah kurang dapat diterima oleh penduduk. Pasca serangan hama tersebut, 19,5 % luas area tanaman kelapa di Kei Besar dengan jenis kelapa dalam yang sudah tidak produktif lagi perlu dipertimbangkan pemanfaatannya berdasarkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya agar tidak berlanjut pada dampak yang lebih buruk lagi.

Pemenuhan kebutuhan mendesak keluarga tani akan menjadi solusi yang paling

dekat dengan keinginan masyarakat tani, sementara program-program perkebunan dan kehutanan Maluku Tenggara T.A. 2005 dan 2006 berorientasi pada kebutuhan pembangunan jangka panjang. Dengan demikian rekomendasi kebijakan untuk solusi penanganan dampak sosial ekonomi akibat serangan hama kelapa dapat berkembang di luar sektor perkebunan yang mencakup sektor pertanian, peternakan dan perikanan sesuai dengan kendala dan peluang yang inheren di kecamatan Kei besar. Dalam hal ini diversifikasi usaha dan integrasi sistem usaha dapat menjadi solusi dalam pengembangan ekonomi pedesaan.

JUSTIFIKASI PERLUNYA DIVERSIFIKASI DAN INTEGRASI USAHA TANI

Diversifikasi dan integrasi sistem usaha merupakan pilihan kebijakan untuk kasus seperti yang terjadi di Kecamatan Kei Besar. Pada satu sisi masyarakat akan memiliki banyak alternatif usaha dengan banyak pilihan komoditas di saat komoditas yang menjadi unggulan atau tumpuan hidup mereka mengalami masalah. Pada sisi yang lain dengan integrasi usaha, masyarakat dapat lebih mengefektifkan penggunaan sumberdaya dengan sekaligus meminimalkan modal dan mendapatkan hasil tambahan.

Diversifikasi usaha memberikan dampak yang lebih luas, di mana dengan diversifikasi usaha diharapkan dapat merubah sistem produksi dan pengalaman kerja masyarakat setempat, yang tadinya terbatas menjadi lebih luas. Demikian pula dengan integrasi usaha, masyarakat akan dibawa pada suasana pengembangan kreativitas dalam pengelolaan sumberdaya lokal, limbah industri, limbah pertanian dan penggunaan waktu lowong untuk kepentingan peningkatan pendapatan.

Dalam pengertian yang lebih sempit, integrasi usaha seperti dalam pengendalian hama dan penyakit dapat mengurangi biaya operasional produksi. Dalam pengertian yang lebih luas, intergritas usaha antar sub-sektor seperti *Crop Livestock System* dapat meningkatkan produktivitas lahan dengan intensifikasi daur unsur hara dan energi dan sekaligus pengurangan biaya operasional dan peningkatan pendapatan usaha tani (Ella, 2001, Kusuma dkk., 2001). Dengan demikian usaha tani integrasi merupakan bentuk diversifikasi usaha tani yang memiliki satu rantai ekosistem terutama dalam pemanfaatan biomassa.

Pola integrasi yang ada di masyarakat umumnya masih menggunakan teknologi tradisional sehingga hasilnya belum optimal. Melalui sentuhan teknologi maju seperti teknologi pemberian pakan penguat dari limbah tanaman industri, teknologi pembuatan kompos dari limbah ternak, peningkatan mutu genetik kambing dan penanganan hasil susu, integrasi kambing dengan tanaman industri seperti kelapa, sawit, cengkeh, jambu mente, kopi, kako, serta tanaman pangan seperti padi dan palawija telah meningkatkan pendapatan petani secara nyata. Pola usaha integrasi ini telah menjadi model yang dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia (Guntoro dkk., 2005; Firdaus dkk., 2005; Susilawati dkk., 2005; Kristianto dkk., 2005; Wijaya dan utomo, 2005; Adijaya dkk., 2005; Savitri dkk. 2005).

PELUANG DAN KENDALA DALAM AGROEKOSISTEM KECAMATAN KEI BESAR

Berdasarkan pada tinjauan kondisi spesifik dan evaluasi, beberapa peluang dan kendala pembangunan pertanian di Kecamatan Kei Besar diringkas di bawah ini (Tabel 1). Ringkasan ini

dibentuk menurut pola sifat-sifat agroekosistem seperti produktivitas, stabilitas, sustainabilitas, dan pemerataan. Ringkasan ini diperlukan untuk menentukan prioritas pengembangan usaha-

usaha alternatif untuk menanggulangi dampak keterpurukan ekonomi pasca serangan hama.

Tabel 1. Ringkasan peluang dan kendala pengembangan pertanian di Kecamatan Kei Besar menurut sub-sektor dan sifat-sifat agroekosistem

Sektor Perkebunan		
Faktor/Pengaruh Positif	Sifat Agroekosistem	Faktor/Pengaruh Negatif
Ketersediaan lahan tanam, lahan persemaian, bibit, pupuk, obat-obatan.	Produktivitas	Iklim kering (area di bawah bayangan hujan), sistem drainase buruk, keterampilan olah tanah rendah, beberapa program reboisasi masih tarap percobaan.
Kesuburan tanah dan serasah tinggi, bencana alam, seperti banjir, tidak ada. Distribusi hujan 7 - 8 bulan setahun. Dukungan program pemerintah, program berdampak ekonomis jangka panjang, variasi komoditas perkebunan, sistem tanam tumpang sari, penampung hasil banyak.	Stabilitas	Hama penyakit, sistem PHT belum diimplementasikan dengan baik.
Sistem usaha perkebunan rakyat dan adanya kelompok tani.	Sustainabilitas	Prokontra yang terjadi ditengah masyarakat, marginalisasi masya-rakat tani dalam pengambilan keputusan, belum ada SLPHT, Teknologi pasca panen belum berkembang, orientasi usaha lebih pada sektor kehutanan.
	Equitabilitas	Tingkat pendidikan rendah, partisipasi masyarakat rendah, kepemilikan lahan rendah,
Sektor Pertanian		
Faktor/Pengaruh Positif	Sifat Agroekosistem	Faktor/Pengaruh Negatif
Ketersediaan lahan kering, bibit, pupuk, obat-obatan, teknologi budidaya dan pasca panen	Produktivitas	Iklim kering (di bawah bayangan hujan), Indek Pertanaman rendah, sistem drainase buruk, irigasi tidak ada, sumber mata air minim, keterampilan olah tanah rendah,
Bencana alam/banjir tidak ada. Musim tanam tersedia 9 bulan. Bulan basah 7 – 8 bulan.	Stabilitas	Hama penyakit, erosi (runn off)
Sistem tumpang sari dan pergiliran tanam, Penampung hasil, Sistem penyuluhan, Transportasi reguler kabupaten	Sustainabilitas	Permintaan pasar rendah (khusus untuk sayuran), Transportasi antar desa biaya tinggi, Usaha kurang berskala ekonomi.
Kelompok tani, Industri Rumah Tangga, kebutuhan tenaga kerja tinggi,	Equitabilitas	Tingkat penguasaan teknologi rendah, kepemilikan lahan rendah.

Tabel 1. (lanjutan)

Sektor Peternakan		
Faktor/Pengaruh Positif	Sifat Agroekosistem	Faktor/Pengaruh Negatif
Ketersediaan lahan gembala, hewan ternak pedaging dan petelur varietas lokal, teknologi pemeliharaan dan pembuatan pakan cukup tersedia, pakan alami untuk ruminansia tersedia strata ke dua (semak dan leguminosae) dan strata ke tiga (pohon hijauan).	Produktivitas	Iklm kering (area di bawah bayangan hujan), masalah keterampilan budidaya hijauan pakan ternak di lahan kering, masalah adaptasi ternak varietas luar, keterampilan penanganan penyakit rendah, masalah permodalan, pakan ternak olahan pabrik mahal, implementasi teknologi IB masih perlu pertimbangan lebih jauh.
Dataran rendah stabil untuk lahan gembala, bebas banjir, longsor. Musim tanam pakan alami tersedia 9 bulan. Bulan basah 7 – 8 bulan. Integrasi usaha kambing dan domba dengan pertanian campuran dan sistem pengelolaan penangkaran, Limbah pertanian tinggi, Teknologi Pengolahan pakan dan kompos dari bahan limbah tersedia, Permintaan pasar pada daging dan telur tinggi, Usaha ekstensif ayam buras. Kelompok tani, Kebutuhan tenaga kerja tinggi, Pola kepemilikan ternak sistem kadas (gaduh) tradisional.	Stabilitas Sustainabilitas Equitabilitas	Penyakit dan virus dokter hewan dan karantina hewan tidak ada, penyuluh profesional minim. Transportasi antar desa minim dan mahal, sementara letak pasar jauh, Usaha ternak belum beskala agribisnis dan belum intensif, Penyuluhan dan pengawasan buruk. Tingkat penguasaan teknologi dan keterampilan rendah
Sektor Perikanan		
Faktor/Pengaruh Positif	Sifat Agroekosistem	Faktor/Pengaruh Negatif
Adanya ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove, perikanan pantai dan lepas pantai, teknologi penangkapan dan budidaya laut	Produktivitas	Keterbatasan modal, sarana dan prasarana penangkapan keterampilan manajemen usaha dan penangkapan rendah, sistem kerja paruh waktu. Angin atau badai
Kondisi perairan subur, up welling terjadi setiap tahun, wilayah terlindung, perairan dangkal. Potensi perikanan di Maluku Tenggara tinggi, tingkat pemanfaatan masih rendah. Terdapat banyak perusahaan penampung hasil perikanan, permintaan pasar domestik dan ekspor tinggi.	Stabilitas Sustainabilitas	Masyarakat tani tidak dipersiapkan (dibina) untuk usaha di laut (industri perikanan). Program pemberdayaan masyarakat pesisir kurang mencapai sasaran.

Tabel 1. (lanjutan)

Terbentuknya Kelompok nelayan. Kebutuhan tenaga kerja tinggi, Adanya pola PIR, akses pada sumberdaya laut besar.	Equitabilitas	Tingkat penguasaan teknologi dan keterampilan penangkapan dan budidaya rendah, persentase kepemilikan armada besar rendah, ethos kerja tani di laut rendah.
--	---------------	---

KOMODITAS ANJURAN DAN PRIORITASDALAM DIVERSIFIKASI USAHA

Berdasarkan sifat agroekosistem lokal, ada 12 alternatif usaha pertanian (Tabel 2) dengan berbagai tingkat prioritas usaha yang dapat dikembangkan (Tabel 3). Pertimbangan ini juga menyangkut kelayakan pasar, teknis usaha dan teknologi yang digunakan, biaya produksi dan waktu produksi. Usaha Tani dengan prioritas 1 sampai dengan 4 adalah ideal untuk pilihan

kebijakan dalam menanggulangi dampak ekonomis dengan segera, sedangkan Usaha Tani dengan prioritas 5 sampai 8 merupakan pilihan sekunder untuk penanggulangan jangka panjang. Sektor perikanan dengan 5 jenis usaha diasumsikan dapat menjadi solusi kebijakan bagi pencapaian target pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat yang terkena dampak buruk tersebut.

Tabel 2. Alternatif usahatani yang dapat dikembangkan di Kecamatan Kei Besar Maluku Tenggara

Pilihan Usahatani	Skala Usaha	Integrasi Usaha
Peremajaan Kelapa Dalam	Perkebunan Rakyat, Agribisnis	CLS
Usaha Tani Jambu Menté	Perkebunan Rakyat, Agribisnis	Cooparate farming
Usaha Tanaman Campuran Palawija dan Hijauan Pakan	Intensifikasi, Agribisnis	CLS
Usaha Tani Jeruk dan Nenas	Intensifikasi, Agribisnis	Cooparate farming
Usaha Tani Itik & Ayam Buras	Intensifikasi, Agribisnis	Cooparate farming
Usaha Tani Sapi Lokal	Pembibitan,Penggemukan, Agribisnis	CLS
Usaha Tani Kambing dan Domba	Pembibitan,Penggemukan, Agribisnis	CLS
Perikanan Karang Demersal	Intensifikasi, Agribisnis	Cooparate farming
Perikanan Lobster dan Kepiting/Rajungan	Intensifikasi, Agribisnis	Cooparate farming
Perikanan Pelagis Kecil	Intensifikasi, Agribisnis	Cooparate farming
Perikanan Kerang Hijau	Intensifikasi, Agribisnis	Cooparate farming

Perikanan dimersal kerapu hidup, ikan napoleon hidup, dan jenis-jenis ikan ekonomis lainnya seperti kakap merah, samandar, kuwe, barakuda merupakan prioritas pertama dalam pengembangan usaha dan merupakan opsi yang paling praktis dan murah. Teknologi untuk perikanan demersal, seperti pancing ulur dan rawai dasar dengan kapasitas perahu dan motor yang kecil, masih tergolong murah dan menguntungkan. Sedangkan pasar untuk

komoditas tersebut terbuka dengan permintaan yang cukup besar. Contoh keberhasilan dari usaha perikanan dimersal ditemukan di pulau Banda Neira, di mana produktivitas perikanan demersal rata-rata 2,4 ton/nelayan/tahun dengan jumlah trip penangkapan rata-rata 190 hari / tahun atau 16 hari / bulan. Armada yang digunakan adalah perahu kole-kole tanpa mesin. Keuntungan bersih tiap nelayan Rp 13,6 Juta per tahun, dengan B/C Ratio 2,31 (Edrus dan La Sui, 2004).

Tabel 3 Diversifikasi Usaha Anjuran menurut prioritasnya untuk Kecamatan Kei Besar Maluku Tenggara

Usahatani Anjuran	Productivity	Stability	Sustainability	Equitability	Biaya	Waktu	Kelayakan	Skor	Prioritas
Peremajaan Kelapa Dalam	**	*	**	*	T	L	T	11	8
Usaha Tani Jambu Mente	**	*	**	*	T	L	S	10	7
Usaha Tanaman Campuran Palawija dan Hijauan Pakan	**	**	***	**	S	S	T	16	4
Usaha Tani Jeruk dan Nenas	**	**	**	**	T	L	S	12	6
Usaha Tani Itik & Ayam Buras	*	**	***	***	R	S	T	17	3
Usaha Tani Sapi Lokal	*	**	**	*	S	S	T	13	5
Usaha Tani Kambing dan Domba	*	*	**	**	S	S	S	12	6
Perikanan Karang Demersal	***	**	**	***	R	P	T	19	1
Perikanan Lobster & Kepiting/Rajungan	**	*	**	**	R	P	T	16	4
Perikanan Pelagis Kecil	***	**	**	***	S	P	T	18	2
Perikanan Budidaya Laut Kerang Hijau	***	**	**	**	R	S	T	17	3

Keterangan: T : Tinggi (skor 3); R: Rendah (skor 1); S: Sedang (skor 2); L: Lama (skor 1); P: Pendek (skor 3)
 * = derajat penilaian, di mana * skor 1, ** skor 2, dan *** skor 3, dst.

Perikanan Pelagis Kecil menempati prioritas ke dua. Teknologi Bagan Apung berbasis rumpon dengan jaring bobo dan Teknologi Bagan Apung dengan jaring angkat (*lift net*) dianggap paling pas untuk peningkatan produksi ikan teri, momar, tembang, dan kembung. Usaha-usaha semacam ini sudah berjalan puluhan tahun, seperti di Sathean Kei Kecil, dan prospek pasarnya cukup baik. Usaha jaring bobo di Banda Neira, misalnya, usaha ini mendapatkan keuntungan bersih per tahun masing-masing Rp. 21,5 Juta untuk pemilik dan ABK, dengan B/C ratio 1,02 dan waktu pengembalian modal 2 tahun (Edrus dan La Sui, 2004).

Prioritas usaha tani yang ke tiga adalah usaha tani unggas (itik dan ayam buras) serta budidaya laut kerang hijau. Produktivitas itik dari hasil percobaan BPTP Maluku dan hasil usaha petani ditingkat lapang, baik untuk populasi ternak dan hasil telur, sangat berbeda. Perbedaan disebabkan oleh sistem pengelolaan. Sistem

pengembalaan di lahan sawah umumnya memiliki produktivitas lebih tinggi dari sistem penangkaran, tetapi ke dua sistem memiliki prospek baik secara ekonomi untuk dikembangkan. Pada sistem penangkaran, rangsum pakan itik atau ayam merupakan pertimbangan paling utama untuk merintis usaha penangkaran unggas. Penggunaan sumberdaya lokal dan limbah agroindustri, limbah rumah tangga (makanan) dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak dan ini dapat mengurangi biaya pakan (Savitri dkk. 2005).

Budidaya kerang hijau membutuhkan modal yang cukup kecil, prosesnya mudah, praktis, tidak perlu pakan, dan waktu panen 6 bulan serta untungnya berlipat. Biaya pembuatan 1 unit bagan lebih kurang Rp 6 juta dengan produksi sekitar 7 ton per unit bagan. Keuntungan antara Rp. 2 – 4 juta per dua bagan (Lis, 2005).

Prioritas usaha tani yang ke empat adalah perikanan lobster dan kepiting/rajungan serta

usaha tani campuran (*Crop Livestock System*) antara palawija dan hijau pakan ternak.

Teknologi yang digunakan dalam perikanan Lobster dan kepiting juga sangat sederhana, mudah dioperasikan dengan armada kecil bermesin 10 HP. Dengan demikian usaha ini juga tergolong paling murah. Alat tangkap yang digunakan umumnya adalah krendet dan bubu. Daerah tangkapan meliputi perairan karang dan perairan mangrove. Harga lobster bervariasi di sentra produksi di Maluku, mulai Rp 70.000 sampai Rp. 100.000,- per kg, demikian pula kepiting bakau mulai dari Rp 30.000,- sampai 40.000,-/kg ukuran super.

Dalam usaha tani integrasi (*CLS*), banyak pilihan palawija yang bisa dikembangkan. Antara lain ubikayu, jagung, ubijalar, umbi-umbian lain, dan kacang tanah. Sedangkan hijauan pakan ternak dapat dikembangkan rumput jenis unggul (*Paspalum atratum*), rumput raja (*Pennisetum sp*) dan tanaman gamal (*Gliricidia sepium*) pada lahan kering. Ternak ruminansia (Sapi, kambing, dan domba) dapat memanfaatkan sisa hasil dan hasil ikutan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pakannya. Sebaliknya bahan organik untuk tanaman yang berasal dari pupuk kandang dapat terpenuhi juga. Nilai tambah pupuk organik dari kotoran sapi bisa mencapai 40 % (Kusuma dkk., 2001). Kontribusi untuk pendapatan dari usaha ternak berkisar antara 2,3 sampai 3,5 %, sedangkan kontribusi dari usaha tanaman 96,5 % sampai 97,7 % (BPTP KALTIM, 2002).

KEBIJAKAN KUNCI PENGEMBANGAN

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas petani yang terkena dampak buruk serangan hama kurang mampu mengembangkan kapasitas untuk usaha di luar

sektor perkebunan kelapa yang menjadi mata pencarian mereka saat ini. Buktinya, tanaman ubi kayu adalah komoditas unggulan di Kei Besar menurut sensus ekonomi 2006, tetapi usaha tani ubikayu tidak tergolong dalam persepektif ekonomi. Sebagian besar ubikayu hanya untuk dikonsumsi sendiri (BPS 2006). Untuk alasan ini, diversifikasi dan integrasi usaha memerlukan beberapa strategi yang mendasar dan dinamis dalam rangka membentuk karakter sosial yang bertanggung jawab dan berdidikasi tinggi dalam usahatani. Simpul utama strategi ada pada pendidikan massa, sedangkan simpul sekunder ada pada sistem usaha (agribisnis), sistem kelembagaan dan paket bantuan lunak.

A. Pendidikan dan Latihan (Diklat)

Pendidikan dan latihan informal merupakan prasyarat utama untuk suksesnya pengelolaan sumberdaya oleh masyarakat. Mata pencaharian alternatif (Tabel 10) yang menjadi opsi kebijakan umumnya di luar kapasitas atau pengalaman petani. Faktor kegagalan diasumsikan sangat besar jika petani tidak dipersiapkan secara intensif. Penyajian brosur atau riplek saja atau pertemuan penyuluh saja belum cukup untuk mengkondisikan petani pada kesungguhan usaha dan membangun ethos kerja yang baik. Pendidikan bukan saja dalam pengertian transfer ilmu dan keterampilan, tetapi harus mencakup pembangunan aspek sosial dan kultural, sehingga terbentuk motivasi, obsesi usaha yang kuat, sikap hidup yang ulet dan bertanggung jawab serta kemampuan yang tangguh. Oleh karena itu pendidikan dan latihan perlu pendekatan bimbingan yang spesifik untuk orang dewasa. Beberapa sekolah lapang seperti Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu,

Sekolah Lapang Usaha Tani Terpadu, Pelatihan Managemen Ekonomi Rumah Tangga Tani, dan sebagainya merupakan bentuk-bentuk baku diklat informal yang praktis dan diberikan bukan saja terbatas bagi ketua kelompok tani, melainkan harus melibatkan anggotanya. Proyek yang mengimplementasikan peningkatan kapasitas seperti ini tidak harus terjebak pada hal-hal yang bersifat baku dan rutinitas, tetapi harus betul-betul terlibat dalam memotivasi masyarakat, baik sebagai perseorangan maupun kelompok.

B. Pendekatan Agribisnis

Konsep agribisnis merupakan anjuran klasik yang tetap dirasakan aktual. Integrasi seluruh subsistem agribisnis dapat secara produktif dan efisien menghasilkan produksi pertanian yang memiliki daya saing yang tinggi. Tanpa usaha agibisnis, usaha tani apa saja yang sekarang berjalan di kecamatan Kei Besar akan berjalan di tempat dan tidak menciptakan pertumbuhan pendapatan. Pengembangan diversifikasi komoditas harus dalam persepektif pertumbuhan ekonomi desa, peningkatan tenaga kerja, pendapatan, dan pemacuan kegiatan-kegiatan budidaya (*on farm*) dan pasca panen dan pemasaran (*off farm*). Paket teknologi untuk menunjang budidaya atau produksi bukan lagi barang langka, tetapi paket pemasaran masih dinamis dan bergantung pada kelembagaan pasar atau permintaan. Sehingga komoditas-komoditas yang dipilih untuk prasyarat PHT juga harus dipilih sebagai komoditas yang berdaya saing tinggi di pasaran, dalam hal ini paket teknologi pasca panen memegang peranan penting di tingkat lembaga pasar.

Secara garis besar pengembangan agribisnis dapat dikembangkan dari interaksi yang

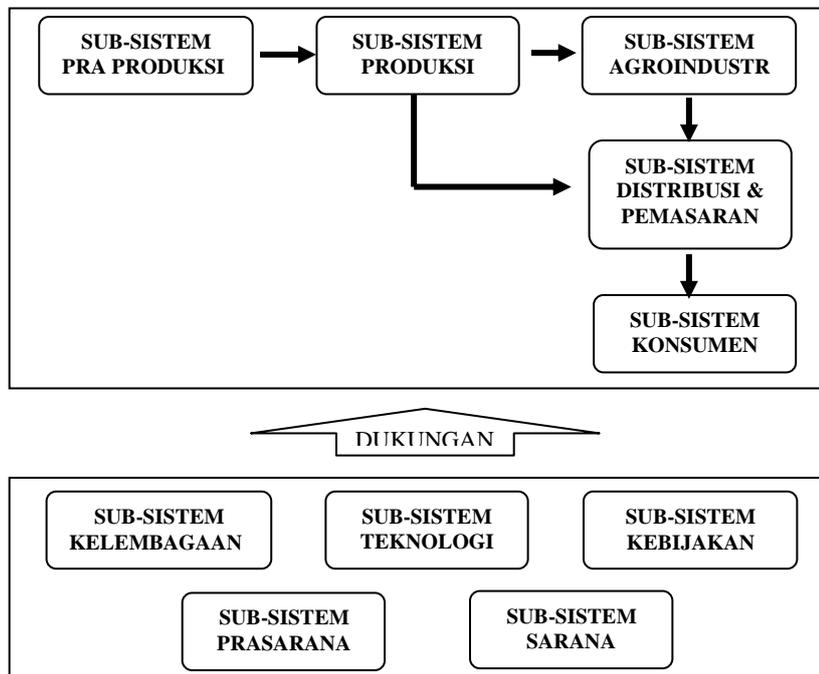
kuat dan saling tergantung antara sub-sistem seperti ditunjukkan oleh Gambar 1. Gambar ini memberikan implikasi bahwa keberhasilan pengembangan komoditas terpilih potensial memerlukan upaya pemberdayaan yang terintegrasi secara utuh dan berkesinambungan mulai dari hulu sampai hilir.

C. Penguatan Kinerja Kelembagaan

Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat (PSBM) merupakan opsi kebijakan yang dianggap paling dekat sebagai model untuk mengintegrasikan dan menstimulasi kinerja dalam masyarakat sehubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam yang potensial (KPP-COREMAP. 2001). Model PSBM terstruktur dalam sistem integrasi masyarakat, memiliki landasan kuat yang berasal dari masyarakat untuk masyarakat, memiliki zonasi wilayah yang jelas, dan ramah lingkungan. PSBM telah dikembangkan pemanfaatannya karena memiliki banyak keistimewaan (Muñoz, 1993). Keistimewaan yang diharapkan dari model ini adalah masyarakat dapat dimandirikan tanpa harus tergantung terus menerus pada proyek ketika waktunya sudah berakhir. Ketika dahulu dalam proyek-proyek pengembangan pertanian, kelompok tani menjadi bagian dari kinerja proyek, tetapi sekarang melalui PSBM mereka diberikan kesempatan secara mandiri mengembangkan proyek-proyek mereka sendiri. Komponen proyek pembentukan PSBM dari unsur Pemerintah sebagai pemilik solusi bukan bertindak sebagai penentu kebijakan, melainkan sebagai fasilitator. UPT di tingkat Kabupaten/Kota bertindak sebagai Fasilitator Utama, sedangkan pihak LSM atau Perguruan Tinggi dapat membantu sebagai Fasilitator Lapangan. Introduksi teknologi, dan bukan intervensi teknologi, dapat diakui sejauh untuk

keperluan modifikasi teknologi milik masyarakat (Partisipatif teknologi). Segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan usaha menjadi tanggung jawab masyarakat, sehingga masyarakat tidak menjadi manja (*“project oriented”*). Masyarakat perlu diberikan kesempatan dan

dibimbing untuk berfikir atau membangun idea dalam urusan kesejahteraan mereka, sehingga mereka mendapatkan pola yang terstruktur, terencana dengan matang untuk pengelolaan sumberdaya disekitarnya yang akan mendatangkan keuntungan.



Adopsi dari Heriyanto dan Rozi, 2002

Gambar 1. Sistem agribisnis untuk beberapa komoditas potensial terpilih

Kelompok-kelompok Petani Kecil secara bersama dapat mengembangkan PSBM dengan basis komoditas masing-masing dengan zona wilayah pesisir. Sementara fasilitator mengarahkan kelompok tani untuk membuat formasi Kelompok Kerja. Kelompok Kerja bertugas mulai dari membuat misi, visi, dan strategi pengelolaan dan pengembangan sampai kemudian membentuk dokumen perencanaan pengelolaan sumberdaya yang potensial dan rencana induk usaha.

Kelembagaan yang terbentuk melalui PSBM merupakan sarana untuk masuk (akses)

pada program-program pemerintah. Sistem pengelolaan sumberdaya semacam ini perlu diakui secara politis dan semua produk dari kinerja PSBM perlu diakui dan diterima untuk masuk pada tender-tender proyek pertanian yang diumumkan pemerintah. Pemerintah juga wajib menjamin bahwa KPK yang tergabung dalam sistem PSBM memperoleh akses pada bantuan kredit lunak.

D. Pengawasan Ketat Penyuluh

Keberhasilan petani dalam usaha juga bergantung pada kinerja penyuluh. Peningkatan kinerja penyuluh dapat melalui peningkatan

pengetahuan dan keterampilan penyuluh, kesejahteraan penyuluh, jumlah kunjungan lapang, dan jumlah petani binaan. Dari 42 desa yang terkena dampak buruk serangan hama, sebaiknya sudah terbagi dengan jelas 8 wilayah binaan, jumlah petani binaan dari setiap wilayah, serta jumlah penyuluh yang bertanggung jawab. Dengan cara demikian, indikator kinerja penyuluh dan alokasi dana bisa terukur. Salah satu indikator kinerja penyuluh yang menjadi target utama adalah keberhasilan penyuluh dalam menciptakan atau meregenerasikan petani-petani untuk melakukan penyuluhan partisipatif dan membentuk jaringan informasi swadaya. Ini artinya adalah proses difusi inovasi dapat berjalan baik.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

KESIMPULAN:

1. Dengan mencermati kondisi terakhir beberapa desa yang terkena dampak negatif serangan hama *aspindontus destructor* di kecamatan Kei Besar, diperoleh gambaran sebagai berikut: (1) penanggulangan hama dan penyakit dilakukan secara spasial, (2) tingkat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan rendah, karena memang tidak dikondisikan partisipatif sejak semula, (3) sebagian besar tanaman kelapa dalam masuk kondisi non-produktif, (4) pendapatan masyarakat petani kelapa menurun (5) ekonomi rumah tangga petani collapse, (6) mata pencarian alternatif tidak ada karena terbentur dengan rendahnya keterampilan manajemen usaha petani. (7) program pemerintah tidak ada yang sinkron dengan penanggulangan dampak jangka pendek, di mana semuanya berskala jangka panjang.

2. Diversifikasi dan integrasi usahatani merupakan pilihan kebijakan untuk meningkatkan kembali pertumbuhan perekonomian desa. Indikator kinerja antara lain menyangkut: (1) Komoditas yang dapat diusahakan antara lain: kelapa dalam, jambu mente, sukun, ubikayu, ubijalar, umbi-umbian lain, kacang tanah, kacang hijau, jagung, jeruk, nenas, pakan hijauan ternak, itik, ayam buras, kambing, domba, sapi, ikan karang/dimersal, ikan pelagis, lobster, kerang hijau, kepiting dan rajungan, (2) Menurut prioritasnya, usaha di sektor perikanan adalah paling ideal untuk solusi penanggulangan kesulitan ekonomi yang sekarang terjadi di 42 desa dalam kecamatan Kei Besar. Usaha di sektor pertanian merupakan program jangka menengah dan sektor perkebunan masuk pada program jangka panjang, (3) Integrasi usaha antara tanaman campuran dan ternak merupakan model usaha terbaik yang direkomendasikan, dan (4) Kebijakan kunci dalam penanggulangan dampak adalah penyelenggaraan pendidikan dan latihan bagi masyarakat.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Secara operasional Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah atau keputusan-keputusan politis menyangkut hal-hal di bawah ini:

1. Pemerintah Daerah perlu dengan segera mendorong masyarakat yang terkena dampak agar duduk bersama untuk membicarakan dan membuat konsensus penetapan sistem pengelolaan sumberdaya potensial berbasis masyarakat yang dimiliki daerah.

2. Unit Pelayanan Teknis masing-masing subsektor perlu memfasilitasi masyarakat tersebut secara terkoordinasi agar mereka membentuk Kelompok Kerja (POKJA), di mana POKJA bertugas membuat Dokumen Induk Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya yang terformat dalam bentuk Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat (PSBM). Dalam hal Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi diharapkan dapat membantu sebagai fasilitator lapangan dan konsultan masyarakat. Fasilitator perlu memberikan batasan bahwa apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat serta memberikan hak keputusan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mengatur diri mereka sendiri.
3. Atribut kelembagaan maupun output dari hasil kinerja PSBM yang di dalamnya termasuk Dokumen Rencana Pengelolaan Sumberdaya, Jaringan Informasi Swadaya Masyarakat, Business Master Plan dan Ketetapan Hukum Adat, serta penetapan Zona Wilayah PSBM (zona konservasi dan pemanfaatan) hendaknya diakui secara politis oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Pemerintah Daerah perlu mengidentifikasi atau menginventarisasi apa saja bentuk usaha alternatif dan bentuk pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan masyarakat dalam dokumen tersebut di atas. Hasil inventarisasi ini selanjutnya dapat digunakan untuk mensinkronisasikan program/proyek pemerintah dengan kebutuhan mendasar masyarakat agar kebutuhan tersebut dapat terealisasi dengan segera.
5. Pemerintah Daerah hendaknya memberikan akses yang wajar dan seluasnya kepada masyarakat dalam Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pesisir yang diimplementasikan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan.
6. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan secara mendalam aspek-aspek sosial kultural dari masyarakat yang tinggal di wilayah proyek dalam setiap implementasi program perkebunan, kehutanan dan peternakan, seperti misalnya hak ulayat, tenure, tenaga kerja, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, aspek integrasi masyarakat (partisipatif) dalam penanggulangan hama dan penyakit.
7. Pada Sub Sektor Peternakan di Kabupaten Maluku Tenggara, sumberdaya manusia merupakan komponen yang paling lemah dan tertinggal, sehingga perlu dilakukan pengembangan kapasitas (tugas belajar) dan penerimaan pegawai baru yang berkualifikasi dokter hewan, Insinyur Peternakan, tenaga medis peternakan, dan penyuluh peternakan.
8. Unit Pelayanan Teknis terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu memfasilitasi usahatani anjuran sebagai upaya penanggulangan dampak sosial ekonomi (pemenuhan kebutuhan mendesak) bagi masyarakat yang terkena dampak serangan hama.

DAFTAR RUJUKAN

- Adijaya, I.N., Suprpto, dan I.M.R. Yasa. 2005. Pengembangan sistem usahatani terpadu pada lahan kering di kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Dalam: Inovasi Usaha Pertanian Terpadu. Puslitbang Sosek Pertanian, Balitbang Pertanian. H. 189.
- BPS, 2006. Maluku Tenggara Dalam Angka 2005. Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara.
- BPS. 2006. Sensus Ekonomi 2006. Pendataan Potensi Desa/Kelurahan. Maluku Tenggara. Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara.
- BPTP Kaltim. 2002. Integrasi ternak kambing dengan usahatani lahan kering berlereng di Kalimantan Timur. Prosiding Seminar dan Ekspose Teknologi Spesifik Lokasi Lingkup Badan Litbang Pertanian di Jakarta, 12 – 13 Agustus 2002. Puslitbang Sosek Pertanian, Bogor.
- Ella, A. 2001. Crop Livestock System di Sulawesi Selatan: Suatu tinjauan pelaksanaan kegiatan. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Bogor, 17 – 18 September 2001.
- Edrus, I.N. dan La Sui. 2004. Analisis permasalahan pembangunan pertanian di Propinsi Maluku Pasca Kerusuhan: Proses Partisipatory Rural Appraisal di Pulau Neira, Kecamatan Banda, Maluku Tengah. Laporan Proyek. T.A. 2003. BPTP Maluku, Ambon.
- Firdaus, d., Muhamad, Y. Surdiyanto, dan A. Gunawan. 2005. Sistem Usahatani integrasi tanaman-ternak pada lahan sawah berpengairan di Jawa Barat. Dalam: Inovasi Usaha Pertanian Terpadu. Puslitbang Sosek Pertanian, Balitbang Pertanian. H. 123.
- Guntoro, S., M.R. Yasa, N. Suyana dan Rubiyo. 2005. Integrasi tanaman industri dengan ternak kambing. Dalam: Inovasi Usaha Pertanian Terpadu. Puslitbang Sosek Pertanian, Balitbang Pertanian. H. 105.
- KPP-COREMAP. 2001. Buku Panduan Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM)-COREMAP. COREMAP – LIPI, Jakarta.
- Kristianto, L.D., S. Wibowo, dan Y. Fiana. 2005. Usaha terpadu sapi potong, tanaman pangan, tanaman perkebunan di lahan kering berlereng. Dalam: Inovasi Usaha Pertanian Terpadu. Puslitbang Sosek Pertanian, Balitbang Pertanian. H. 157.
- Kusuma, D., B.R. Prawiradiputra dan D. Lubis. 2001. Integrasi Tanaman-Ternak dalam Pengembangan Agribisnis yang Berkelanjutan dan Berkerakyatan. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Bogor, 17 – 18 September 2001.
- Lis. 2005. Wisad: Pelopor Kerang Hijau di Banten. Rubrik Sorotan. Sinar Tani. Edisi 24 – 30 Agustus 2005. No. 3113.
- Muñoz, J.C. 1993. Community-Based Resource Management as an Approach for Implementing Coastal Resource Management Component of the Fishery Sector Program. *In: Community-Based Resource Management: Perspectives, Experiences and Policy Issues*. F.P. Fellizar Jr. (Ed). Environmental and Resource Management Project, Institute of Environmental Science & Management, UPLB, Los Baños, Philippines.
- Savitri, S., J. Sudrajat, D. Andayani, B. Baskrie, M. Yanis, dan B.V. Lotulung. 2005. Pemanfaatan limbah pertanian dan agroindustri sebagai pakan itik. Dalam: Inovasi Usaha Pertanian Terpadu. Puslitbang Sosek Pertanian, Balitbang Pertanian. H. 201.
- Susilawati, M. Sabran, dan Rukayah. 2005. Usahatani padi-kedelai/sayuran-ternak di lahan pasang surut. Dalam: Inovasi Usaha Pertanian Terpadu. Puslitbang Sosek Pertanian, Balitbang Pertanian. H. 139.
- Untung, K. 2003. Startegi Implementasi PHT dalam Pengembangan Perkebunan Rakyat Berbasis Agribisnis. Dalam: Risalah Simposium Nasional Penelitian

PHT Perkebunan Rakyat, Bogor, 17 – 18 September 2002. Bagian Proyek PHT Tanaman Perkebunan. h. 1.

Wijaya, E. Dan B.N. Utomo. 2005. Pemanfaatan limbah pengolahan minyak kelapa sawit yang berupa solid untuk pakan ternak (Sapi, domba dan ayam potong). Dalam: Inovasi Usaha Pertanian Terpadu. Puslitbang Sosek Pertanian, Balitbang Pertanian. H. 173.